

PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEMELAGI BESAR TAHUN 2012

Oleh
SUPARDI
NIM. E01110069

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Abstrak

Pelaksanaan program bedah rumah yang terjadi di Desa Semelagi Besar tahun 2012 masih belum optimal karena ditemukan tindakan penyimpangan. Pemahaman mengenai pelaksanaan program bedah rumah untuk masyarakat miskin yang telah dilakukan di Desa Semelagi Besar oleh pemerintah desa. Tujuan penelitian ini juga dimaksudkan, agar proses pengawasan terus dilakukan sehingga masyarakat yang mendapat bantuan program bedah rumah adalah masyarakat yang memang layak untuk dibantu dan mengurangi tindakan penyimpangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan menurut Winardi terdiri dari: penetapan standar dan metode penilaian kerja. Pelaksanaan program bedah rumah yang sebagian masih tidak tepat sasaran, baik dinilai dari segi ekonomi, umur, pendapatan yang ditinjau berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Sambas untuk penerima bantuan bedah rumah. Serta penyimpangan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) tingkat desa. Adapun biaya pelaksanaan pembangunan bedah rumah banyak dipangkas oleh tim pelaksana kegiatan tingkat desa dalam proses pembelian bahan bangunan yang akhirnya pembangunan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa, unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kecamatan dan unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kabupaten belum optimal. Adapun saran mengurangi penyimpangan pemerintah kabupaten Sambas maupun UPK semua tingkatan harus memiliki ketegasan mengenai standar kerja agar hasil yang dicapai sesuai dengan standar.

Kata kunci: *Pengawasan, Program, Bedah Rumah, Miskin.*

MONITORING OF PROGRAM IMPLEMENTATION OF POOR PEOPLE HOME SURGERY IN SEMELAGI BESAR VILLAGE YEAR 2012

Abstract

Program implementation of home surgery that happened in Semelagi Besar village year 2012 still not optimal because found deviation action of the comprehension about program implementation of home surgery for poor people that already done in Semelagi Besar village by village government. The aim of this research be intended, in order to keep doing the monitoring process so that the people who get the help of surgery home is the people who proper to be helped and cut down the deviation action. Theory that used in this research is steps that be done in monitoring function according to Winardi that consist of standart decision and work assessment method. The implementation of home surgery that some part still not appropriate to the target, right see from economic factors, age, income that observ according to the standart that set by Sambas regency government for receiver of home surgery program, also deviation that be done by activity implementor team (TPK) village level. The implementation cost of the development of home surgery has many cutting by activity implementor team of village level in process of the building materials bought that in the end of the development not suitable with the standart that set before. Besides that the monitoring that be done by the village head, activity implementor unit (UPK) subdistrict level and activity implementor unit (UPK) regency level are not optimal. The suggestion is decrease the deviation of Sambas regency government and activity implementor unit (UPK) all levels must have firmness about the work standart so that the result appropriate with the standart.

Key Word : Monitoring, Program, Home Surgery, Poor

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan dinamis, artinya manusia tidak bersifat tetap akan tetapi selalu tumbuh dan berkembang dengan adanya pengaruh lingkungan. Tumbuh dan berkembangnya manusia ditentukan oleh kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, manusia perlu memiliki potensi datangnya dari diri mereka sendiri yaitu berupa pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Oleh karena itu, wajar setiap manusia peka terhadap lingkungan sekitarnya jika ada kepincangan sosial yang terjadi dilingkungannya. Manusia selalu respon dan peduli terhadap sesama apabila suatu masyarakat di sekitarnya mendapatkan musibah, masalah, maupun tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang.

Salah satu program unggulan dari pemerintah adalah pengentasan kemiskinan untuk masyarakat dari golongan berpenghasilan rendah yang tujuannya untuk mengangkat taraf hidup masyarakat miskin. Adapun program tersebut adalah program bedah rumah untuk masyarakat miskin yang

sering disebut bantuan stimulant perumahan swadaya. Sebagai harapan dan tujuan kami dengan adanya program bedah rumah tidak layak huni tersebut akan tercipta lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sambas.

Adanya program ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak huni. Adapun hal ini juga bertujuan mengurangi kemiskinan, dengan demikian kehidupan mereka bisa lebih baik. Apa yang di cita-citakan masyarakat dengan pelaksanaan program bedah rumah ini akhirnya tercapai dengan memiliki tempat tinggal yang layak.

Dalam program ini aparat desa dan pengurus kegiatan banyak melakukan tindakan penyimpangan. Berdasarkan hasil penelitian didapat data bahwa Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelagi Besar Tahun 2012 yang tepat sasaran dan tidak tepat sasaran kalau di nilai pada usia produktif 17-45 tahun dan usia tidak produktif/ lanjut usia 46 tahun ke atas berjumlah 22 orang sedangkan yang tidak tepat sasaran berjumlah 18 orang kalau dihitung berdasarkan persenan yang tepat sasaran 55% dan tidak tepat sasaran 45%.

Penerima bantuan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin Di Desa Semelagi Besar Tahun 2012 tepat sasaran dan tidak tepat sasaran kalau di nilai berdasarkan kendaraan bermotor yang dimiliki. Tepat sasaran berjumlah 22 orang atau 55% dan yang tidak tepat sasaran 18 orang atau 45%.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti mengenai pengawasan pelaksanaan program bedah rumah di Desa Semelagi Besar, dilihat dari sudut ketepatan sasaran pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan keefektifan program ini dalam masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak di selesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang

berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Pengawasan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi pemikiran rasional yang telah dipersyaratkan dan pola perilaku sesuai normatif yang berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu, sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah manajemen dapat tercapai. Pengawasan atas kegiatan atau pekerjaan yang dipercayakan kepada seseorang merupakan suatu alat ukur untuk menentukan apakah orang yang bersangkutan itu memiliki komitmen, kejujuran, dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengawas adalah seseorang yang di berikan otoritas oleh manajemen atau pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah diberikan kewenangan, pelaksanaan kewenangan sebenarnya bisa melahirkan pertanggung jawaban yang kemungkinannya dapat mengandung makna ganda, pertama kebenaran dan kedua kebohongan semuanya akan di uji dalam aktivitas pengawasan.

Winardi (2000:587) menyebutkan bahwa: "Pengawasan, berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya

mengevaluasi. Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dan aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Winardi mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yakni:

- mencari keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan
- Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan).
- Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan terdiri dari:

1. Penetapan standar dan metode penilaian Kinerja
2. Penilaian Kinerja
3. Penilaian apakah Kinerja memenuhi standar atukah tidak
4. Pengambilan tindakan koreksi
pengawasan bertujuan supaya pelaksanaan pekerjaan yang dihasilkan

diperoleh secara berdaya guna (*efisien*) dan berhasil, maka yang dimaksud dengan pengawasan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mengetahui pengawasan dalam pelaksanaan program bedah rumah untuk masyarakat miskin di desa semelagi besar tahun 2012. Pengawasan tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan program bedah rumah guna melakukan pengawasan yang ketat terhadap bawahan.

2. Pelaksanaan Program Bedah Rumah

Program bedah rumah yang digagas Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat (BSPS) merupakan sebuah program yang membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan hunian yang layak huni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 huruf H mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya Undang-Undang RI no. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menetapkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memeberikan pelayanan dan perlindungan

sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Lanjut usia secara fisik akan mengalami secara alami mereka akan mengalami penurunan fisik sehingga mobilitas rendah, interaksi terbatas dan komunikasi akan mengalami hambatan. Seiring dengan kondisi dimaksud sebagian besar lanjut usia akan mengalami penurunan produktifitas yang berdampak pada penurunan ekonomi, bahkan tidak kurang diantaranya mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang pangan dan papan/perumahan. Meski belum ada data yang pasti namun di masyarakat banyak ditemukan para lanjut usia tinggal di rumah yang tidak layak huni, tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan utama bagi lanjut usia, dimana lansia membutuhkan tempat berteduh, tempat perlindungan di hari tua, maka Kementerian Sosial menyelenggarakan kegiatan bedah rumah bagi lansia. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menyamakan pemahaman yang sama dengan pelaksana bedah rumah, Kementerian Sosial Cq. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut usia menyusun Panduan Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah sehingga perencanaan dan

pelaksanaan bedah rumah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Tujuan Layanan

- 1) Tersedianya rumah yang layak untuk tempat tinggal lanjut usia.
- 2) Adanya tempat tinggal yang aman dan nyaman serta akses bagi lanjut usia.
- 3) Meningkatnya kemampuan lanjut usia dalam melaksanakan perannya dalam keluarga maupun masyarakat.
- 4) Tersedianya lingkungan yang bersih, sehat, yang memungkinkan lanjut usia hidup secara layak.

b. Manfaat Layanan

Dana bantuan dimanfaatkan sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan agar lanjut usia memiliki rumah yang layak huni sehingga terlindunginya dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan hanya digunakan untuk pembelian bahan-bahan / material bukan untuk ongkos kerja, biaya tukang/kuli dan konsumsi. Pelaksanaan Bedah Rumah dikerjakan secara gotong-royong oleh masyarakat setempat dibawah koordinasi LKS / Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten / Kota.

c. Kriteria

- 1) Rumah tidak permanen dan dalam kondisi rusak.

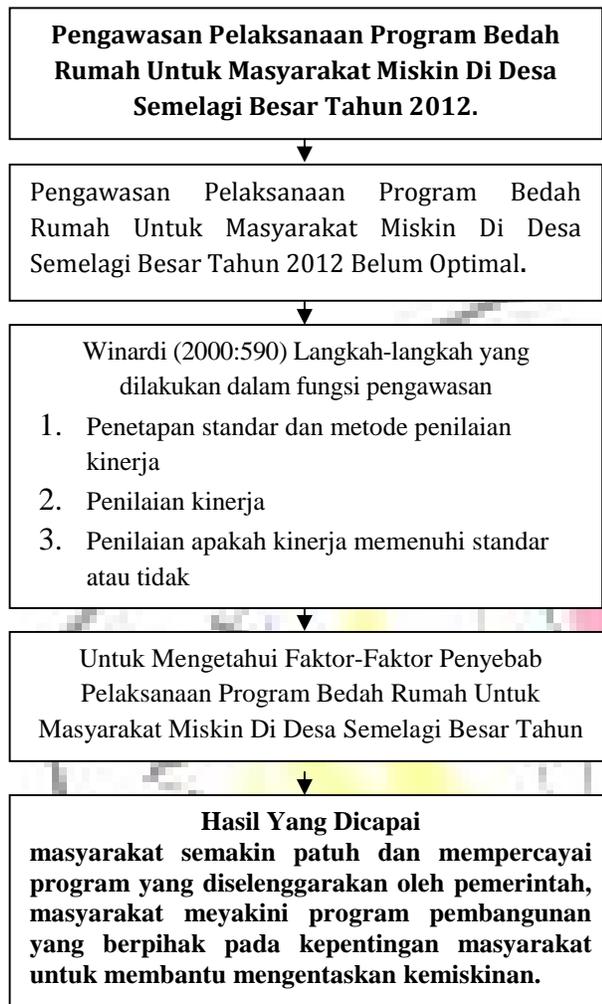
- 2) Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/ lapuk seperti papan yang sudah lapuk, gedek atau bambu yang dianyam.
- 3) Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan penghuninya.
- 4) Lantai rumah dan kamar dari tanah atau semen/pelur tapi dalam kondisi rusak.
- 5) Rumah yang memiliki/ tidak memiliki fasilitas kamar ataupun MCK yang tidak layak, tidak berfertilasi.
- 6) Memiliki surat yang sah atas kepemilikannya serta tidak dalam sengketa.
- 7) Adanya dukungan masyarakat setempat atau pihak-pihak lain untuk melaksanakan proses bedah rumah sampai dengan selesai secara bersama-sama.
- 3) Penerima bantuan bedah rumah adalah lanjut usia terlantar berusia 60 tahun keatas, tinggal dikeluarga atau tinggal sendiri dalam kondisi miskin
- 4) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Kartu Keluarga
- 5) Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota atau Pelaksana Bedah Rumah harus memiliki dana dampingan (sharing budget), dari dana APBD/SCR
- 6) Adanya kesiapan masyarakat sekitar untuk bergotong royong melaksanakan bedah rumah
- 7) Pelaksanaan bedah rumah selesai 1 (satu) bulan setelah pencairan dana bantuan
- 8) Tanggung Jawab mutlak keberhasilan pelaksanaan bedah rumah dan pelaporan keuangan ada di Dinas Sosial Provinsi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

d. Syarat

- 1) Rumah lansia yang akan dibedah dalam keadaan rusak, tidak sehat dan tidak layak huni
- 2) Status tanah/rumah Tanah dan rumah adalah milik lansia yang dibuktikan dengan surat/dokumen status kepemilikan yang legal dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain

Kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar kerangka fikir



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena objek dan masalah yang diteliti memerlukan pendalaman untuk memperoleh makna sebagaimana dipahami oleh subjek

penelitian. Oleh karena itulah penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Alasan dilakukannya penelitian di Desa Semelagi Besar mengenai pengawasan pelaksanaan program bedah rumah untuk masyarakat miskin belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Serta didalam program ini ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa dalam pelaksanaan program bedah rumah karena kurangnya pengawasan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek peneliti terdiri dari kepala desa dan UPK tingkat kecamatan (unit pelaksana kegiatan) sebagai pengawas pelaksana kegiatan program bedah rumah, UPK tingkat desa sebagai pelaksan kegiatan dan sekaligus penerima bantuan program bedah rumah, dan masyarakat sebagai pengawas eksternal pelaksanaan program bedah rumah.

b. Objek Penelitian

Objek yang diteliti ialah program bedah rumah yang diberikan oleh pemerintah daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah

a. Wawancara

Metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang narasumber dengan bercakap-cakap berhadapan muka orang itu. Narasumber itu terdiri dari masyarakat, aparat desa, serta unit pelaksana kegiatan (UPK).

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas dan mendalam melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara kepada informan penelitian.

b. Dokumentasi

Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan referensi lain.dokumentasi yang didapat berupa foto-foto dan dokumen.

5. Teknik Analisis Data

Mengingat data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi pada penelitian ini bersifat data kualitatif, maka teknik analisis data juga menggunakan teknik analisis kualitatif.

Mengacu pada teori dia atas, maka teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Uraian tentang penggunaan teknik analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data, yaitu merangkum data yang sudah terkumpul tentang keterkaitan mahasiswa dengan kelompok yang acuan dalam bertindak dan berperilaku. Langkah pertama peneliti melakukan reduksi data hasil wawancara dan dokumentasi. Berkaitan dengan teknik reduksi data.

b. Display Data

Display data yaitu, proses penyajian data ke dalam bagian yang sesuai atau membentuk jalinan antar satu faktor dengan yang lainnya. Data yang tidak lengkap akan dilacak kembali di lapangan.

c. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan akhir, atau penulisan dari hasil deskriptif berupa laporan ilmiah.Langkah ketiga dari analisis kualitatif pada penelitian ini adalah membuat kesimpulan sementara sebelum dilakukan

verifikasi. Kemudian kesimpulan sementara tersebut diverifikasi untuk mengecek kebenarannya dan mencari data pendukung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan standar dan metode penilaian Kinerja

Program bedah rumah masyarakat miskin adalah program perbaikan rumah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu yang tidak layak huni agar menjadi layak huni. Bagaimana meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu secara swadaya. Dalam hal ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan/program bedah rumah dan masyarakat secara bergotong royong melaksanakan pembangunan rumah yang akan diperbaiki. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber di desa semelagi besar.

Kepala desa mengatakan bahwa program bedah rumah ialah merupakan program yang lebih mengarah kebutuhan bukan keinginan dari desa untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar layak untuk di bantu dan benar-benar tidak memiliki rumah yang layak huni. Selain

kepala desa semelagi besar, ketua kelompok penerima bantuan mengatakan bahwa program bedah rumah adalah program yang ditujukan ke masyarakat yang kurang mampu dan merupakan bantuan social dari pemerintah daerah. Selain kepala desa dan ketua kelompok saya juga mewawancarai salah satu masyarakat mengenai apa itu program bedah rumah.

Program bedah rumah masyarakat miskin merupakan program dari KEMENPERA yang dilaksanakan di setiap kabupaten, kabupaten membentuk tim. Tim yang dibentuk di kabupaten memberikan pengarahan ke kecamatan mengenai program bedah rumah bagaimana proses administrasi agar program tersebut bisa sampai ke masyarakat dengan memberikan pengarahan dan pendampingan di setiap kecamatan. Kecamatan membentuk tim unit pelaksana kegiatan (UPK) di setiap desa dan unit pelaksana kegiatan tersebut di ketuai oleh kepala desa.

Pelaku program bedah rumah desa/kelurahan terdiri dari kepala desa/kelurahan, tim laksana (TPK/TPK), LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), dan tokoh masyarakat. Pelaku program bedah rumah kecamatan terdiri dari camamt, penanggung jawab operasi kegiatan (PJOK), dan konsultan pendamping kecamatan.

Pelaku program beah rumah kabupaten terdiri dari bupati, tim koordinasi program bedah rumah kabupaten, dan konsultan manajemen kabupaten.

Tujuan dari program bedah rumah adalah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni masih jauh dari harapan, maka pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah secara terus menerus melaksanakan kegiatan program bedah rumah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengertian masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Kepala desa mengatakan mengenai tujuan dari program bedah rumah adalah memebantu masyarakat yang tidak memiliki rumah, dan juga membantu masyarakat agar bisa hidup lebih layak dengan memiliki rumah yang baru, maksudnya agar keadaan

ekonominya bisa bangkit atau meningkat. Program ini sangat membantu masyarakat agar bisa hidup layak. Masyarakat juga mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan program bedah rumah ialah dapat meningkatkan perekonomian orang mendapatkan bantuan dan juga bisa mengangkat drajat hidup masyarakat yang dibantu bisa lebih baik lagi.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program bedah rumah: pertama percepatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya peningkatan swadaya, prakaras dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kedua peningkatan kapasitas penduduk miskin. Ketiga pengembangan nilai budaya.

kegotong-royongan dan kesawadayaan masyarakat. Keempat terpenuhinya kebutuhan papan/perumahan ynag layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin. Kelimameningkatnya drajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan prilaku hidup bersih dan sehat.

2. Penilaian Kinerja

Pelaksana program bedah rumah masyarakat miskin di desa semelagi besar dilakukan oleh kepala desa dan jajarannya, kemudian di bentuk kelompok-kelompok

yang anggota kelompok adalah masyarakat penerima bantuan program bedah rumah. Kelompok penerima bantuan dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan, kelompok 1 terdiri dari 15 orang, kelompok 2 terdiri dari 15 keompok, dan kelompok 3 terdiri dari 10 orang.

program bedah rumah bersifat kelompok yang terbagi menjadi tiga kelompok dengan jumlah rumah 40 unit, untuk 2 kelompok masing-masing mendapat rumah bantuan 15 unit, dan satu kelompoknya lagi mendapat rumah bantuan 10 unit. Adapun nama-nama ketua kelompok penerima bantuan program bedah rumah ialah bapak Joni, bapak Bujang Perkan, dan bapak Isai. dalam hal pelaksanaan program bedah rumah di desa semelagi besar saya juga mewawancarai masyarakat selaku pengawas eksternal.

pelaksanaan program bedah rumah bersifat kelompok yang terbagi menjadi tiga kelompok dengan jumlah rumah 40 unit, untuk 2 kelompok masing-masing mendapat rumah bantuan 15 unit, dan satu kelompoknya lagi mendapat rumah bantuan 10 unit. Adapun nama-nama ketua kelompok penerima bantuan program bedah rumah ialah bapak Joni, bapak Bujang Perkan, dan bapak Isai. dalam hal pelaksanaan program bedah rumah di desa semelagi besar saya

juga mewawancarai masyarakat selaku pengawas eksternal.

Penerima bantuan atau sasaran program bedah rumah adalah masyarakat miskin yang belum memiliki rumah dan memiliki rumah tidak layak huni, serta masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum. Adapun sasaran program bedah rumah selain kriteria dasar yang di jelaskan sebelumnya penerima bantuan adalah orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu untuk bekerja keras, janda tua, orang cacat, serta orang miskin dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kantor desa, dan memiliki tanah pribadi bukan milik orang lain.

Adapun kriteria penerima bantuan harus memenuhi persyaratan administrasi lapangan terdiri dari:

- a. warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP;
- b. MBR (penghasilan dibawah UMR rata-rata nasional) atau masyarakat miskin, dengan menunjukan surat keterangan penghasilan;
- c. Sudah berkeluarga dibuktikan dengan KK (kartu keluarga);
- d. Memiliki atau menguasai tanah dengan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah;

- e. Belum/telah memiliki dan menghuni rumah tetapi tidak layak huni;
- f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah/pemda;
- g. Didahulukan yang telah berencana membangun/memperbaiki rumah;
- h. Bersungguh-sungguh dibuktikan dengan mendatangi surat pernyataan;
- i. Dapat bekerja secara kelompok.

kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberian program bedah rumah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima program bedah rumah ini mengingat begitu banyaknya kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima program bedah rumah ini. Sehingga dengan adanya kendala ini maka pemberian program bedah rumah ini kepada masyarakat kurang tepat sasaran. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih teliti lagi agar pemberian program bedah rumah ini tepat sasaran. Kendala masih dihadapi termasuk minimnya informasi terkait keberadaan masyarakat yang memang harus diberikan bantuan. Bahkan diantaranya ada beberapa masyarakat yang memang malu mengatakan dirinya miskin, setelah ditanya baru

mengaku. Adapun kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program bedah rumah saat ini adalah banyaknya warga masyarakat yang mengajukan program bedah rumah sementara anggaran yang disediakan terbatas disamping masalah perbedaan nilai besaran bedah rumah ini disebabkan pembelian bahan bangunan bedah rumah setiap lokasi berbeda tergantung jauh dekatnya tempat pembelian bahan bangunan.

Dari keterangan bapak Joni mengatakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bedah rumah masalah pencairan dana ke 2 lambat. Gaji tukang semuanya terhambat, bahkan dalam pembelian makanan dan minuman harus hutang. Sehingga proses pembangunan yang dilakukan sedikit terhambat.

3. Penilaian apakah Kinerja memenuhi standar atau tidak

Menetapkan standar dari pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat dijadikan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target adalah yang digunakan sebagai standar. Adapun bentuk-bentuknya:

1. Standar – standar fisik, meliputi kuantitas, jumlah dan kualitas

2. Standar – standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, penjualan dan sejenisnya

3. Standar – standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu.

Ada beberapa factor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor – faktor itu adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi (Berbagai perubahan lingkungan organisasi seringkali tidak dapat dihindari , seperti munculnya inovasi baru, peraturan baru dsb.)
2. Peningkatan kompleksitas Organisasi (Semakin besar organisasi maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal, maka segalanya harus bisa dimonitor dengan baik).
3. Kesalahan – kesalahan (Bila prabawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan – kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis).
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang (Satu satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas yang telah

dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan system pengawasan).

Dalam pelaksanaan program bedah rumah masyarakat miskin di Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau perbaikan dalam proses pengawasan sangat perlu dilakukan karena banyak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan baik dalam penyediaan barang dan jasa serta sasaran yang di tuju masih ada sebagian yang tidak tepat sasaran.

Salah satu masyarakat mengatakan perlu perbaikan dalam pengawasan, karena selama ini hanya orang-orang yang dekat dengan aparat desa yang menjadi pengawas dalam pelaksanaan program bedah rumah. Dalam melakukan penyimpangan mudah dilakukan karena tidak ada pihak luar yang atau pihak yang netral mengawasi pelaksanaan program bedah rumah. Pihak luar/netral adalah masyarakat umum yang tidak ada hubungan mengenai pelaksanaan program bedah rumah.

Dalam ISO 9001:2008 tindakan perbaikan diatur dalam klausul 8.5.2 mengenai Tindakan Perbaikan atau Corrective Action. Berikut ini kutipan klausul persyaratan tersebut:Perusahaan atau organisasi melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab-penyebab ketidak sesuain untuk mencegah terulang kembali.

Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak dari ketidak sesuaian yang dihadapi. Perusahaan menetapkan prosedur terdokumentasi dalam menetapkan persyaratan untuk

1. Peninjauan ketidak sesuaian.
2. Penetapan penyebab ketidak sesuaian.
3. Penilaian tindakan untuk memastikan bahwa ketidak sesuaian tidak terulang.
4. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan.
5. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan.
6. Peninjauan keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan.

Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk menghilangkan ketidak sesuaian serta mencegah terulangnya ketidak sesuaian tersebut pada pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan berdasarkan pada analisa akar permasalahan yang menimbulkan terjadinya ketidak sesuaian tersebut.

Inti permasalahan yang menimbulkan terjadinya ketidak sesuaian yang dapat dicarikan solusinya secara individual maupun sistemik tergantung pada akar permasalahan yang ditemukan. Akar permasalahan dapat diidentifikasi dengan menentukan apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, serta memberikan alternatif

solusi bagaimana mengurangi hal tersebut sehingga tidak terjadi permasalahan serupa di kemudian hari.

Ruang lingkup Tindakan Perbaikan mencakup penentuan sumber ketidak sesuaian, evaluasi tindakan untuk pencegahan terulangnya ketidaksesuaian, penerapan tindakan yang dibutuhkan, pencatatan tindakan perbaikan, serta evaluasi terhadap efektifitas tindakan perbaikan yang dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan yang berorientasi pada layanan prima.

4. Pengambilan tindakan koreksi

Program BPS atau "bedah rumah", merupakan salah satu unggulan Kementerian Perumahan Rakyat sebelum digabungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kemenpupera. Program tersebut bertujuan antara lain, membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang kurang mampu di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan target penanganan bedah rumah berdasarkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode tahun 2015-2019, diharapkan dapat mencapai angka 2,2 juta unit untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit.

Program BPSPS merupakan, salah satu upaya pemerintah untuk memberikan stimulan kepada masyarakat serta mendorong Pemda untuk ikut peduli terhadap program perumahan bagi masyarakat yang saat ini masih banyak tinggal di RTLH. Jumlah bantuan yang diberikan untuk program BPSPS tersebut, bervariasi mulai Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta tergantung pada kondisi rumah yang akan diperbaiki.

Permasalahan yang ada dalam proses pembangunan meliputi permasalahan yang sifatnya mendasar seperti yang umum dialami oleh sebagian besar daerah lain, serta permasalahan ikutan yang berkembang seiring dengan lajunya pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut antara lain:

- Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan pangan, sandang dan papan.
- Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
- Laju pertumbuhan ekonomi yang masih lambat.
- Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.
- Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia termasuk prilakunya, sehingga belum mamapu mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Program bedah rumah yang direncanakan untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan rumah layak huni telah terlaksana sesuai tahun anggaran, namun dalam pelaksanaannya banyak hal yang telah menyimpang dari tujuan awal seperti: kualitas bahan dibawah standar, terlambatnya waktu dari rencana awal, tenaga kerja yang tidak sesuai harapan, tidak tepat sasaran, dan berbagai masalah lain yang menjadi keluhan penerima bantuan. Perlu kajian dan evaluasi dari pelaksana program bedah rumah secara menyeluruh untuk meminimalkan masalah dalam pelaksanaannya dengan lebih mengedepankan swadaya masyarakat. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan jika hasil yang diharapkan tidak sesuai,

Harapan dengan adanya program bedah rumah dapat membantu masyarakat, terutama masyarakat usia lanjut dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Serta program ini memberikan perubahan dalam kenyamanan, keamanan, serta masyarakat yang mendapat bantuan dalam program ini jenjang kehidupannya tidak terlalu jauh dengan masyarakat yang lain.

Inti dari program ini sangat membantu sekali bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.

Narasumber mengatakan harapan masyarakat dengan adanya program ini masyarakat yang mendapatkan bantuan dapat meningkatkan perekonomiannya serta memiliki kehidupan yang sejahtera. Kehidupan masyarakat yang dibantu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, yang dulunya uang untuk membangun rumah dengan adanya bantuan program bedah rumah uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.

Program bedah rumah yang direncanakan untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan rumah layak huni telah terlaksana sesuai tahun anggaran, namun dalam pelaksanaannya banyak hal yang telah menyimpang dari tujuan awal seperti: kualitas bahan dibawah standar, terlambatnya waktu dari rencana awal, tenaga kerja yang tidak sesuai harapan, tidak tepat sasaran, dan berbagai masalah lain yang menjadi keluhan penerima bantuan. Perlu kajian dan evaluasi dari pelaksanaan program bedah rumah secara menyeluruh untuk meminimalkan masalah dalam pelaksanaannya dengan lebih mengedepankan swadaya masyarakat. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan jika hasil yang diharapkan tidak sesuai.

Upaya yang dilakukan jika dalam proses pelaksanaan program bedah rumah tidak sesuai dengan rencana masyarakat memprotes dan memberikan teguran. Biasanya dari pihak keluarga yang mendapatkan bantuan program bedah rumah. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri jika terjadi penyimpangan. Masyarakat mengajukan permasalahan yang terjadi ke kepala desa bahwa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana program bedah rumah.

Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Kesadaran moral dari semua masyarakat adalah karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Jadi kejahatan akan selalu ada karena orang selalu ada yang berwatak jahat. Ia juga menjelaskan bahwa suatu kejahatan memang diperlukan bagi masyarakat, karena dengan adanya kejahatan

moralitas dan hukum dapat berjalan dengan normal. Dengan demikian peraturan akan dibuat setelah terjadi penyimpangan atau kejahatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial adalah sebagai berikut ini :

- a) Sikap mental yang tidak sehat.
- b) Ketidakharmonisan dalam keluarga.
- c) Pelampiasan rasa kecewa.
- d) Dorongan kebutuhan ekonomi.
- e) Pengaruh lingkungan dan media massa.
- f) Keinginan untuk dipuji.
- g) Proses belajar yang menyimpang.
- h) Ketidaksanggupan menyerap norma.
- i) Adanya ikatan sosial yang berlain – lainan.
- j) Proses sosialisasi nilai – nilai subkebudayaan yang menyimpang.
- k) Kegagalan dalam proses sosialisasi.

Suatu kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah – maupun aparat pemerintahan baik dari tingkat atas sampai tingkat terbawah tindakan penyimpangan tidak bisa kita hindarkan apalagi menyangkut masalah uang. Penyimpangan mudah dilakukan karena faktor lingkungan yang menyebabkan mudahnya melakukan penyimpangan maupun tindakan-tindakan yang diluar aturan yang berlaku. Mengenai pelaksanaan program bedah rumah yang

dilakukan di desa Semelagi Besar, kecamatan Selakau banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa dan pelaksana kegiatan diantaranya banyak masyarakat yang usia muda mendapatkan bantuan, adanya sistem kekeluargaan, serta pembelian bahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program bedah rumah di desa Semelagi Besar, kecamatan Selakau, kabupaten Sambas pada tahun 2012 terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa dan TPK/UPK baik dalam penyediaan barang dan jasa, serta sasaran yang dituju.

E. Kesimpulan

Dalam proses pengawasan pelaksanaan program bedah rumah masyarakat miskin di desa Semelagi Besar tahun 2012 terdiri dari Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan yaitu:

1. Penetapan standar dan metode penilaian Kinerja

Hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana program bedah rumah dikatakan terjadi penyimpangan karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

Kementerian Perumahan Rakyat, baik dalam penyediaan barang dan jasa serta sasaran yang dituju. Stadar yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bedah rumah belum terlaksana dengan baik.

2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Program bedah rumah yang dibuat sebenarnya merupakan program yang ideal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni sehingga memiliki rumah yang layak huni. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Semelagi Besar menjadi tidak berhasil - dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pelaksana program bedah rumah. Akibatnya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana program bedah rumah.

F. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan agar setidaknya dapat mengurangi penyimpangan penyimpangan yang ada yaitu:

1. Pemerintahan Kabupaten Sambas, dan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dalam Penetapan standar dan metode penilaian Kinerja perlu ketegasan mengenai standar

kerja agar hasil yang ingin dicapai sesuai yang harapan.

2. Pemerintahan Kabupaten Sambas, dan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dalam penilaian kinerja perlu meningkatkan pengawasan terhadap aparatur desa dan juga terhadap pelaksana program, sehingga dalam pelaksanaan program sulit untuk melakukan penyimpangan.

G. REFERENSI

Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.

Bungin, Burhan.2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo.

Duhari. November 2013. *Proposal bedah rumah penduduk*, diambil pada tanggal 27 maret 2015 dari <http://duhari daya.blogspot.com/2013/11/proposal-bedah-rumah-penduduk.html>

Hazin, Nur Kholit. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Terbit Terang.

Ika. April 2014. *Pengertian Dokumentasi, Dokumen, Rekod, Dan Arsip*. Diambil pada tanggal 21 april 2015 dari <http://ikapelajaran.blogspot.com/2014/04/pengertian-dokumentasi-dokumen-rekod.html>

Inggraini. 2014. "*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Dharmasraya*".(skripsi) evaluasi,

implementasi kebijakan sosial. Januari-april 2014.

Koontz, Harold, Cyril O'donnel, and Heinz Weihrich. 1996. *Management*, Alih Bahasa Alfonsus Sirait, *Management*, Erlangga, Jakarta.

Mudjia, Raharjdo.15 Oktober 2010. *Trangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, diambil pada tanggal 20 maret 2015 dari <http://teori%20pengawasan/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Muhamad fadhli. 09/01/2013. *Pengertian pengawasan*, diambil pada tanggal 27 maret 2015 dari <http://iamfadhli.wordpress.com/2013/01/09/39pengertian-pengawasan.html>

Muhammad samin. 12/10/2013. *Penerima bedah rumah dari kemenpera*, diambil pada tanggal 10 januari 2016 dari http://www.kompasiana.com/muhammadsamin/derita-penerima-bedah-rumah-dari-kemenpera_54f426f77455139f2b6c8888

Mulyadi.S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Nawawi, H. Hadari. 2005. *Managemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Menteri No 14 Tahun 2011
Siraj, nurdin. Agustus 2011. *Nuklian teori pengawasan*. Di ambil pad tanggal 10 maret 2015 dari <http://nurudinsiraj.blogspot.com/2011/08/bberapa-nukilan-teori-pengawasan.html>

Siswanto, edhi. 2012. *“Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah Bagi Warga Miskin Tahun 2006 Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten*

Jember”.(jurnal) evaluasi, kebijakan. POLITICO Vol. XII No. 1 Maret 2012:- 2012-10-19.

Soebandi, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung. Pustaka Setia. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945

Widiyono. 2012. *“Dampak Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR) Terhadap Peningkatan Modal Sosial Di Kabupaten Purbalingga”*.(jurnal) evaluasi kebijakan, program stimulant pemugaran rumah keluarga miskin, modal sosial, kepercayaan, jaringan sosial. Febuari-mei 2012.

Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta. Avyrrouz.

Winardi.2000:590. *Asas-Asas Manajemen*, Rajagrafindo, Persada, Jakarta.

Yusuf, Adriani. 2012. *Profil Desa Semelagi Besar*. Pemerintahan Desa Semelagi Besar, Sambas.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUPARDI
 NIM / Periode lulus : E01110069, III
 Tanggal Lulus : 12 Januari 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 E-mail address/ HP :/081522704270

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Langkasan Pelaksanaan Program Bawah Rumah
masjidat miteh di Desa Sumbaga Barat Tahun
2012

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 13 Juni 2016



SUPARDI
 NIM: E01110069

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)